



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)

2025

BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA GORONTALO
TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan SKPD khususnya dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun kedepan, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal disusun.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ini, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) yang telah disusun ini diharapkan diikuti dengan tindaklanjut berupa pelaksanaan, komitmen dan motivasi yang tinggi melaksanakan rencana yang telah tersusun ini. Harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran – sasaran pembangunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Gorontalo, 2025

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA GORONTALO,**



MOHAMMAD MULKY DATAU, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19830521 200112 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN	6
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan	6
2.1.1 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai target s/d Triwulan II ..	12
2.1.2 Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan	13
BAB III RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN.....	19
BAB IV PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II BKPP Kota Gorontalo.....	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II	15
Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perubahan Renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana yang diamanatkan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo sebagai bagian terintegrasi dari pemerintah daerah menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dalam sebuah Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja). Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo membuat Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan perubahan renja perangkat daerah

Penyusunan rancangan perubahan renja dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada perubahan

rancangan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan renja perangkat daerah terdiri atas

a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- ✓ analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- ✓ analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- ✓ penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

- ✓ pendahuluan;
- ✓ evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- ✓ rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- ✓ penutup.

2. Penyusunan rancangan akhir perubahan renja perangkat daerah.

Selanjutnya Perubahan Renja BKPP Kota Gorontalo disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan RKPD untuk diverifikasi Bappeda;

3. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Rancangan akhir perubahan renja yang telah disempurnakan dan diverifikasi oleh Bappeda diserahkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. perubahan Renja yang telah ditetapkan menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (P-RKA) BKPP Kota Gorontalo Tahun 2025

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

a. adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2025 dengan pagu APBD tahun 2025.

- b. adanya pergeseran pagu sub kegiatan pada rincian sub kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi yang harus segera dilaksanakan;
 - c. adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain:
 - adanya perubahan kurikulum baru yang harus diikuti peserta latsar bagi calon PNS lulusan STTD sebanyak 11 orang;
 - adanya pelaksanaan Kegiatan Seleksi Terbuka/ Job Bidding untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 6 Jabatan Lowong;
- sehingga dilakukan pergeseran anggaran antar sub kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2);
- k. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025 – 2029
- l. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan pada APBD Tahun 2025. Secara rinci maksud dari penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan untuk Anggaran Tahun 2025 guna membangun kinerja yang lebih akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Semester 1 Tahun Anggaran 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan renja BKPP sampai dengan triwulan II Tahun 2025 (evaluasi terhadap proyeksi capaian renja untuk tahun berjalan) terhadap capaian renja BKPP Tahun 2025 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir BKPP Tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I karena triwulan II masih berjalan pada saat renja perubahan di susun.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPP sampai dengan triwulan I dan triwulan II, maka gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPP sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja / sub Kegiatan yang telah mencapai 50%
2. Capaian Kinerja / sub Kegiatan yang telah melebihi 50%
3. Capaian Kinerja / sub Kegiatan yang di perkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa :
 - a. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BKPP dan
 - c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan pencapaian renstra OPD adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025 diuraikan sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	SATUAN	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun berjalan)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6=5/4*100	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi kepegawaian tepat waktu	Persen	90%	996.365.400	35%	180.649.875	38,9	18,13
5.03.02.2.01	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase rata - rata capaian kinerja pengadaan, pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN	Persen	90%	196.427.100	35,43%	60.031.482	39,4	30,56
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	86.929.700,00	0	25.962.982	0	29,87
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	100	14.110.300,00	39	765500	39	5,43
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN Yang Difasilitasi	Lembaga	1	20.000.000,00	0		0	0,00
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	52.650.000,00	3	33.037.500	25	62,75
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	12	22.737.100,00	3	265500	25	1,17
5.03.02.2.02	Mutasi Dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi Yang Diproses Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persen	100%	560.160.400	30,95%	8.222.200	30,95	1,47
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	2	489.539.400,00	0	5904200	0	1,21

5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1750	19.297.800,00	543	375500	31,03	1,95
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	12	51.323.200,00	3	1942500	25	3,78
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	Persen	100%	49.066.600	26,66%	12.443.502	26,66	25,36
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	300	49.066.600,00	80	12.443.502	26,67	25,36
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	100%	190.711.300	29%	99.952.691		52,41
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	12	168.500.000,00	3	99.000.000	25	58,75
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	5	22.211.300,00	2	952691	40	4,29
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persen	80%	349.051.025		22.945.000	0	10,91
5.04.02.2.02	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persen	100%	349.051.025	50%	22.945.000	50	10,91
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	2	349.051.025	1	26.875.000	50	7,69
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	6.890.511.202	21,2	2.342.596.625	21,2	34,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja	Persen	100	32.440.100	28,5	10.431.000	28,5	32,15
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	12.069.900,00	0	3.313.500	0	27,45
5.03.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	4.441.700,00	0		0	0,00

5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	10.470.500,00	3	2.586.000	25	24,70
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	5.458.000,00	3	4.531.500	100	83,02
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah	Persen	100	5.633.001.796	25	2.045.683.908	25	36,32
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	574	5.580.721.796,00	246	2.006.877.908	42,9	35,96
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	48.329.000,00	3	35.678.000	25	73,82
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.951.000,00	1	3.128.000	100	79,17
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Barang Milik Daerah	Persen	100	13.775.000	25	5.706.000	25	41,42
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	12	13.775.000,00	3	5.706.000	25	41,42
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	8.830.000	25	2.598.450	25	29,43
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	8.830.000,00	3	2.598.450	25	29,43
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	Persen	100	339.072.090	25	69.892.236	25	20,61
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2.699.500,00	3	810.000	25	30,01
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	12	26.195.340,00	3	1.267.130	25	4,84

5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	12	41.274.000,00	3	1.235.500	25	2,99
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Laporan	12	14.412.800,00	3	1.983.100	25	13,76
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	45.961.500,00	3	8.407.936	25	18,29
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	208.528.950,00	3	56.188.570	25	26,95
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Dan Prasarana dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	194.538.266	0	0	0	0,00
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	unit	2	13.108.962,00	2	0		0,00
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	unit	7	181.429.304,00	7	0	0	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	599.567.950	25	198.925.031	25	33,18
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.000.000,00	3	557000	25	27,85
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	360.455.450,00	3	91.718.081	25	25,45
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantir Yang Disediakan	Laporan	12	237.112.500,00	3	106.649.950	25	44,98
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Dipelihara	Persen	100	69.286.000	20	9.360.000	20	13,51
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	45.420.000,00	1	7.500.000	14,29	16,51
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	1	9.936.000,00	0		0	0,00

5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12	13.930.000,00	3	1.860.000	25	13,35
-----------------	--	--	------	----	---------------	---	-----------	----	-------

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II pada tabel 2.1 diatas dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

2.1.1 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai target s/d Triwulan II

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah, terdiri dari :

- ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
- ❖ Administrasi Barang Milik Daerah pada PD
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Baran Cetak dan Penggandaan
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Kepegawaian Daerah

- ❖ Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

- a) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- b) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- c) Pengelolaan Data Kepegawaian
- ❖ Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2.1.2 Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Kepegawaian Daerah

- ❖ Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
 - a) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - b) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- ❖ Mutasi dan Promosi ASN
 - a) Pengelolaan Mutasi ASN
 - b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c) Pengelolaan Promosi ASN
- ❖ Pengembangan Kompetensi ASN
 - a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- ❖ Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- ❖ *Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*
 - a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Kepemimpinan dan Prajabatan Tinggi, Jabatan Fungsional,

2.1.3 Faktor Penyebab belum tercapainya target kinerja program kegiatan/belum dilaksanakan

- ❖ Terdapat beberapa kegiatan yang dijadwalkan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV sehingga belum dapat dilaksanakan
- ❖ Terdapat kekurangan dalam penganggaran pada kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dimana direncanakan untuk pelaksanaan seleksi terbuka pada pengisian jabatan khususnya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- ❖ Terdapat kegiatan pendidikan latihan dasar (LATSAR) yang sementara jalan akan tetapi dalam realisasi keuangan belum terakomodir karena menyesuaikan kurikulum yang sementara berjalan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Namun pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo belum mempunyai dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan Kota Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Kota Gorontalo, dan melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Pelaksanaan tugasn dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo tersebut diatas, maka indikator kinerja berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Indeks Profesionalitas ASN
- 2) Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis IT
- 3) Nilai AKIP
- 4) Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti

Pengukuran capaian kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan reallisasi Indikator Kinerja Utama dan penjelasan dari capaian masing-masing IKU adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II

No	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra	Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun Berjalan	Catatan Analisa
1	2	3	4	5
1	Indeks Profesionalitas ASN	63		Nilai Indeks
2	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis IT	80		Nilai Indeks

Berdasarkan tabel 2.2 bahwa pencapaian kinerja pelayanan OPD Tahun berjalan sampai dengan triwulan II belum maksimal disebabkan :

- ❖ Belum terlaksananya program kegiatan di bidang kepegawaian yang menunjang pencapaian target IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang pelaksanaannya di jadwalkan pada Triwulan III dan IV tahun berjalan.
- ❖ Terdapat CPNS Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) orang yang baru menerima SK sehingga dapat mengikuti Pendidikan Latihan Dasar pada Triwulan III atau IV sambil menunggu jadwal pelaksanaan dari LAN RI
- ❖ Belum diterbitkannya ijin pelaksanaan Seleksi Terbuka / Job Bidding untuk pengisian Jabatan lowong pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang pelaksanaannya di rencanakan pada Triwulan III dan IV

Untuk itu beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator adalah sebagai berikut :

- ❖ Melakukan penyesuaian target dan belanja pada perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Anggaran pada Tahun 2025

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Tuntutan visi keempat Walikota Gorontalo yakni Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumber daya aparatur dituangkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dalam sasaran startegisnya yakni meningkatnya pengembangan sumber daya aparatur dan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dengan mengedepankan penanganan isu-isu yang berkembang serta permasalahan permasalahan dibidang kepegawaian dan Diklat. Capaian kinerja pelayanan BKPP sampai dengan tahun 2024 antara lain :

1. Indeks Profesional ASN capaian kinerja 96.7 %
2. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian IT Capaian Kinerja 107.42%

Dari 2 indikator kinerja diatas dua indikator masih masih perlu mendapat perhatian yaitu indikator 1 “Indeks Profesionalitas ASN” karena realisasinya masih belum mencapai target yang ditentukan. Pemerintah Kota Gorontalo yang tinggi terhadap peningkatan kompetensi aparatur akan menjadi salah satu

pendorong dalam meningkatkan capaian kinerja tersebut. Adapun beberapa isu penting dalam peningkatan kinerja BKPP antara lain :

- Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen talenta dalam mutasi dan promosi jabatan

Manajemen Talenta bagi Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN menjadi pedoman bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam upaya akselerasi reformasi manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Manajemen Talenta selain menjadi pilar penting dari sistem merit, Manajemen Talenta bertujuan untuk mempersiapkan pegawai yang memiliki kompetensi terbaik untuk mengisi posisi maupun jabatan yang selaras dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, sehingga akan tercipta pelayanan publik yang optimal dan mendorong pencapaian strategis dari pembangunan daerah yang berpengaruh pada tren positif dalam proses pembangunan nasional.

Namun dalam pelaksanaannya, Manajemen Talenta belum terlaksana dengan baik dalam proses kegiatan mutasi dan promosi jabatan di lingkup Pemerintahan Kota Gorontalo, hal ini dapat ditinjau dari posisi jabatan tertentu yang diisi oleh pegawai yang memiliki kompetensi kurang sesuai dengan jabatannya. Patut disadari bahwa pelaksanaan Manajemen Talenta merupakan tahapan penting demi mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang optimal melalui pegawai yang memiliki kompetensi terbaik yang akan dilaksanakan di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo, maka dari itu penerapan masih akan dipelajari dari BKD Provinsi Gorontalo yang sudah terlebih dahulu menerapkan Manajemen Talenta kepada pegawai yang ada di lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo

- Belum optimalnya Disiplin aparatur

Belum optimalnya disiplin aparatur dapat dilihat pada kedisiplinan waktu dan kedisiplinan kerja, tingkat kehadiran pegawai, kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing individu pegawai, kemampuan berinovasi masih rendah, dan penempatan aparatur yang belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, hal-hal tersebut berpengaruh pada tingkat kedisiplinan aparatur, yang dapat mempengaruhi produktivitas pegawai itu

sendiri dan pegawai lain yang menggantikan pekerjaan pegawai yang kurang disiplin, serta berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan.

➤ **Belum Optimalnya Pemetaan Kompetensi Pegawai.**

Dengan adanya undang-undang Aparatur Sipil Negara maka kompetensi aparatur menjadi faktor penting dalam tingkat kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dimiliki oleh masing masing pegawai agar senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara. Kompetensi bagi setiap individu harus terus ditingkatkan pencapaiannya baik melalui pendidikan formal, kursus maupun pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan pola pikir menuju kearah yang lebih baik. Untuk mempersiapkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara sempurna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, perlu adanya pemetaan kompetensi terhadap seluruh aparatur pemerintah Kota Gorontalo agar pengelolaan pemerintah terhadap pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tepat sasaran

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah 2025 – 2029 . Rencana Kerja ini memuat arah dan kebijakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selama 1 (satu) tahun dan menjadi dasar perumusan kegiatan, output Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo adalah Program Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA - P juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. RENJA - P juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dan Pendanaannya sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rincian Program, Kegiatanb, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcoma)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (sub output)		SATUAN	Target		PAGU			K E T
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10=9-8	11
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi kepegawaian tepat waktu	Persentase Penyelesaian Administrasi kepegawaian tepat waktu	Persen	90%	90%	996.365.400	629.367.800	366.997.600	
5.03.02.2.01	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase rata - rata capaian kinerja pengadaan, pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN	Persentase rata - rata capaian kinerja pengadaan, pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN	Persen	90%	90%	196.427.100	151.325.900	-45.101.200	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	2	86.929.700,00	43.007.600,00	-43.922.100	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	100	100	14.110.300,00	3.378.900,00	-10.731.400	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN Yang Difasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN Yang Difasilitasi	Lembaga	1	1	20.000.000,00	12.273.800,00	-7.726.200	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	52.650.000,00	89.037.500,00	36.387.500	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengeloaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengeloaan Data Kepegawaian	Dokumen	12	12	22.737.100,00	3.628.100,00	-19.109.000	
5.03.02.2.02	Mutasi Dan Promosi ASN	Mutasi Dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi Yang Diproses Sesuai	Persentase Mutasi dan Promosi Yang Diproses Sesuai	Persen	100%	100%	560.160.400	413.236.700	146.923.700	

			Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Dengan Ketentuan Yang Berlaku							
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	2	2	489.539.400,00	370.840.400,00	-118.699.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1750	1750	19.297.800,00	9.907.100,00	-9.390.700	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	12	12	51.323.200,00	32.489.200,00	-18.834.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	Persentase ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	Persen	100%	100%	49.066.600	64.805.200	15.738.600	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah ASN Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	300	300	49.066.600,00	64.805.200,00	15.738.600	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	100%	100%	190.711.300		-190.711.300	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	12	12	168.500.000,00	216.498.100,00	47.998.100	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	5	5	22.211.300,00	7.703.300,00	-14.508.000	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persen	80%	80%	349.051.025	210.278.400	-138.772.625	

5.04.02.2.02	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persen	100%	100%	349.051.025	210.278.400	138.772.625	-
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	2	3	349.051.025,00	210.278.400,00	138.772.625	-
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	6.890.511.202	6.012.479.624	878.031.578	-
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja	Persen	100	100	32.440.100	32.785.600	345.500	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	12.069.900,00	12.140.100,00	70.200	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	4	4.441.700,00	4.434.400,00	-7.300	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	12	12	10.470.500,00	10.482.000,00	11.500	

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	5.458.000,00	5.729.100,00	271.100	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah	Persen	100	100	5.633.001.796	5.049.483.355	-583.518.441	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	574	574	5.580.721.796,00	4.952.771.355,00	-627.950.441	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	48.329.000,00	92.766.000,00	44.437.000	
5.03.01.2.02.05	Koordinaasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinaasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	3.951.000,00	3.946.000,00	-5.000	
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Barang Milik Daerah	Persentase Layanan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	13.775.000	21.943.000	8.168.000	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	12	12	13.775.000,00	21.943.000,00	8.168.000	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	8.830.000	8.830.000	0	
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	8.830.000,00	8.830.000,00	0	

5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	Persentase Layanan Administrasi Umum	Persen	100	100	339.072.090	176.748.570	162.323.520	-
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	2.699.500,00	3.699.500,00	1.000.000	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	12	12	26.195.340,00	14.787.270,00	-11.408.070	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	12	12	41.274.000,00	16.088.200,00	-25.185.800	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Laporan	12	12	14.412.800,00	9.442.300,00	-4.970.500	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	45.961.500,00	39.256.800,00	-6.704.700	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	208.528.950,00	93.474.500,00	115.054.450	-
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Dan Prasarana dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Dan Prasarana dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	194.538.266	0	194.538.266	-
5.03.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		unit	2	2	13.108.962,00	0,00	-13.108.962	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	unit	7	7	181.429.304,00	0,00	181.429.304	-
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	599.567.950	616.419.099	16.851.149	

5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12	360.455.450,00	321.418.474,00	-39.036.976	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantir Yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantir Yang Disediakan	Laporan	12	12	237.112.500,00	292.000.625,00	54.888.125	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Dipelihara	Persentase BMD Yang Dipelihara	Persen	100	100	69.286.000	106.270.000	36.984.000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	45.420.000,00	45.420.000,00	0	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	1	1	9.936.000,00	46.920.000,00	36.984.000	
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12	12	13.930.000,00	13.930.000,00	0	
TOTAL								8.235.927.627	6.852.125.824	-1.383.801.803	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Esensi dari semua program dan kegiatan ini adalah bahwa semua pihak atau para stakeholder yang memiliki peran dalam program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo diharapkan dapat mengamankan semua kebijakan yang ada dan dengan sungguh-sungguh dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.

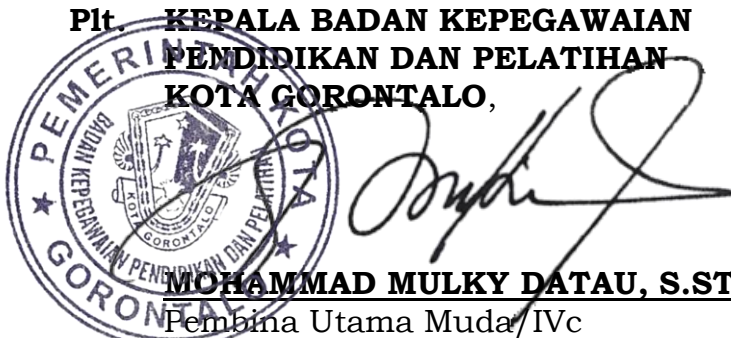
Selain itu, Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo merupakan dasar evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahunan BKPP Kota Gorontalo yang berarti bahwa setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Perubahan Rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dapat terlaksana apabila mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak dan tersedianya anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dibuat untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan pelayanan Kepegawaian dan Diklat di Kota Gorontalo.

Gorontalo, 2025

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA GORONTALO,**



MOHAMMAD MULKY DATAU, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19830521 200112 1 004